

Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial

M. Enoch Markum
Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia

This article describes poverty which is a big problem on this planet, particularly in Indonesia. The estimation is that there are 1.4 billion poor people in the world and there are about 35 million poor people in Indonesia. Poverty affects several aspects of life such as: education, housing, crimes, and mental health. All of the presidents of Indonesia, many non-governmental organizations and the society, have been trying to prevent the increasing rate of poverty. Unfortunately, there is no significant result so far. Incomplete understanding about poverty might explain the non-significant result of poverty prevention. Poverty is usually stated as the poor people's lacking of entrepreneurship, of skill, and that the poor has negative personality sides. Based on this incomplete understanding, this article proposes some alternatives for comprehensive poverty elimination through individual, cultural and structural intervention. The social psychology approach for poverty eradication means that the intervention is for the individual and his/her social environment in which social structural and cultural are included. Individual intervention means that we need to cut out the poverty circle. Cultural intervention means that we need to change this deprivation culture. Structural intervention means that we need to change the paradigm about the poor held by those who deal with policies related to poverty.

Keywords: poverty culture, poverty cycle, deprivation, frustration, uncontrollability, helplessness, depression, passivity, dependency, empowerment

Salah satu masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan. Dengan tolok ukur pendapatan per kapita 1,25 dolar AS, diperkirakan jumlah penduduk miskin di dunia 1,4 milyar orang ("Understanding poverty," 2009). Menghadapi kenyataan ini, komunitas internasional telah membuat kesepakatan dan menyatakan komitmennya pada kesempatan

United Nations Millennium Summit tahun 2000 di New York. Hasil dari pertemuan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Milenium yang ditandatangani oleh sejumlah negara (termasuk Indonesia) yang mempunyai sejumlah sasaran atau dikenal dengan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai pada tahun 2015. Di antara delapan sasaran dimaksud,

salah satunya adalah “menanggulangi kemiskinan dan kelaparan”.

Bila Indonesia berniat mematuhi Deklarasi Milenium, maka waktu yang tersisa untuk mengatasi masalah kemiskinan ini sangat pendek atau tinggal enam tahun lagi. Melihat data BPS 2008 mengenai penduduk miskin di Indonesia yang berjumlah 34,90 juta orang dan data Susenas BPS 2006 mengenai penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun yang tidak cukup signifikan, misalnya penduduk miskin tahun 2004: 36,10 juta; tahun 2005: 35,10 juta; dan tahun 2006: 39,10 juta (Brodjonegoro, 2007), maka wajar kiranya bila kita meragukan keberhasilan Indonesia mencapai MDSs tahun 2015; apalagi bila kita mencermati dampak krisis ekonomi global 2008 yang mulai dirasakan oleh Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan 6,0%, dengan terjadinya krisis ekonomi global 2008, menurut perhitungan Pemerintah hanya akan mencapai 4,5% (“Kemiskinan bertambah,” 2009). Demikian pula, jumlah orang miskin tahun 2009 yang semula diperhitungkan oleh Pemerintah 32,38 juta orang akan meningkat menjadi 33,71 juta orang atau setara dengan 14,87% jumlah penduduk Indonesia. Dalam hubungan dengan kemiskinan ini, pendapat Fadhil Hasan berikut ini akan menguatkan pesimisme kita terhadap pencapaian MDGs oleh Pemerintah tahun 2015. Menurut Hasan (“Kemiskinan bertambah,” 2009), melambatnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pengangguran karena setiap 1,0% pelambatan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan 300.000 orang kehilangan kesempatan kerja. Jika angka ini dikalikan dengan empat orang anggota keluarga, maka akan ada 1,2 juta orang yang tidak ternakahi atau jatuh miskin. Sementara itu, terdapat

sekitar 600.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan dipulangkan dari luar negeri.

Bila kita mencermati sejarah kemiskinan dan penanggulangannya di Indonesia, maka sebenarnya masalah kemiskinan ini tidak pernah luput dari perhatian Pemerintah, siapa pun yang menjadi presiden (Kusumaatmadja, 2007). Hal ini dapat kita saksikan dengan diawali oleh Presiden Soekarno yang menuangkan program kemiskinan dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun; Presiden Soeharto dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos), dan lain-lain; Presiden Habibie dengan Jaringan Pengaman Sosial, Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan lain-lain; Presiden Abdurrahman Wahid dengan Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), dan lain-lain; Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain.

Di samping upaya Pemerintah, masyarakat pun ikut berperan dalam mengatasi kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dengan memberikan penghargaan kepada para wirausahawan sosial (2006). Demikian pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan, antara lain LSM Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, Bina Desa, Bina Masyarakat Sejahtera, dan Bina Sumber Daya Mitra.

Dalam hubungan dengan peran masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan ini, perlu

dikemukakan upaya seorang profesor ekonomi dari Bangladesh yang memperoleh hadiah Nobel Perdamaian 2006, yaitu Muhammad Yunus. Hal ini perlu dikemukakan karena ia telah berhasil dengan Grameen Bank-nya memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin tanpa agunan (94% perempuan) untuk digunakan sebagai modal usaha.

Perlu juga diketengahkan pelibatan partai politik dalam pengentasan kemiskinan yang disayangkan perhatian dan intensitas kegiatannya baru meningkat pada saat menjelang kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah berlangsung sejak lama dan telah melibatkan pihak pemerintah, swasta, LSM, dan partai politik sebagaimana diuraikan terdahulu tampaknya belum berhasil menurunkan angka kemiskinan secara bermakna (Brodjonegoro, 2007). Hal ini disebabkan antara lain oleh: (a) luasnya masalah kemiskinan, $\pm 15\%$ penduduk miskin dari seluruh penduduk Indonesia, (b) penanganan kemiskinan yang tidak terintegrasi karena ego sektoral yang sangat kuat, (c) tidak melibatkan dan memberdayakan (*empowering*) orang miskin dalam mengatasi kemiskinan, (d) peraturan perundangan yang tidak memihak kaum miskin, dan (e) kemiskinan dilihat sebagai masalah ekonomi dan keterampilan teknis semata-mata.

Cara pandang kemiskinan yang terakhir ini (menekankan faktor ekonomi atau keterbatasan modal usaha dan keterampilan teknis) terlihat dari dikucurkannya dana yang besar oleh pemerintah dan didirikannya sejumlah balai latihan kerja (BLK), serta diselenggarakannya berbagai kursus keterampilan singkat. Sebagai ilustrasi anggaran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dari tahun ke tahun tampak terus

meningkat: 18 triliun (tahun 2004), 23 triliun (2005), 42 triliun (2006), dan 51 triliun (2007) (Kusumaatmadja, 2007). Dalam kenyataan terbukti bahwa alokasi anggaran pengentasan kemiskinan yang naik dari tahun ke tahun ini tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara bermakna karena selain posisi tawar (*bargaining position*) orang miskin yang lemah, juga mereka tidak mampu melihat peluang bisnis (*business opportunity*) sehubungan dengan kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan.

It is important to stress that alleviating poverty is not only a matter of giving financial aid, but more significantly, giving the poor a sense of individual mastery over their lives which preserves their dignity and self respect. (Ortigas, 2000, h. 44)

Berdasarkan kutipan Ortigas di atas, jelas bahwa pengentasan kemiskinan bukan semata-mata masalah permodalan dan keterampilan teknis, melainkan masalah bagaimana membangkitkan perasaan mampu mengatasi hidup di kalangan orang miskin dengan cara yang bermartabat dan menjaga harga-diri. Dalam hubungan inilah, disiplin psikologi—khususnya melalui pendekatan psikologi sosial—dapat memberikan sumbangan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Akibat Kemiskinan

Pembahasan mengenai akibat kemiskinan dalam tulisan ini dibatasi pada akibat kemiskinan terhadap berbagai fenomena kehidupan yang dialami oleh masyarakat miskin perkotaan sebagai akibat urbanisasi. Untuk itu marilah kita cermati perbandingan jumlah

penduduk miskin pedesaan dan perkotaan di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2006 (Susenas BPS, 2006, dalam Brodjonegoro, 2007) sebagaimana tampak dalam Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2000 – 2006

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta orang) | | |
|-------|--|----------|-------|
| | Perkotaan | Pedesaan | Total |
| 2000 | 12,3 | 26,4 | 38,7 |
| 2001 | 8,6 | 29,3 | 37,9 |
| 2002 | 13,3 | 25,1 | 38,4 |
| 2003 | 12,2 | 25,1 | 37,3 |
| 2004 | 11,4 | 24,8 | 36,1 |
| 2005 | 12,4 | 22,7 | 35,1 |
| 2006 | 14,3 | 24,8 | 39,1 |

Berdasarkan Tabel 1, nampak bahwa secara garis besar jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar (hampir dua kali lebih banyak) daripada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Salah satu implikasi dari jumlah penduduk miskin yang besar di pedesaan ini adalah urbanisasi dengan segala permasalahannya di perkotaan, seperti pedagang kaki lima, pemukiman liar di pinggir rel kereta api dan bantaran kali, pengemis, anak jalanan, dan kriminalitas. Dengan perkataan lain, kemiskinan di pedesaan dengan jumlah besar mengakibatkan arus urbanisasi dan urbanisasi menghasilkan masalah sosial (*social problems*) di perkotaan.

Secara lebih rinci, uraian mengenai akibat kemiskinan terhadap aspek kehidupan lain ini menggunakan rujukan pendapat Farley (1987) dalam bukunya *American Social Problems: An Institutional Analysis*. Digunakannya rujukan masalah sosial di Amerika Serikat, khususnya yang berkenaan dengan kemiskinan (*poverty*)

karena, menurut pendapat penulis, masalah sosial di Amerika Serikat yang dianalisis Farley pada saat itu mempunyai banyak kesamaan atau kemiripan dengan kondisi kemiskinan Indonesia tahun 2000-an.

Bagaimana dan Apa Akibat Kemiskinan?

Kemiskinan berakibat pada partisipasi dan kualitas orang miskin. Artinya, akses anak-anak miskin terhadap lembaga pendidikan yang bermutu sangat terbatas, di samping kemungkinan putus-sekolah (*drop-out*) juga besar. Hasil penelitian Farley (1987) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa prestasi sekolah anak-anak miskin (*disadvantage children*) umumnya lebih rendah daripada anak-anak Amerika yang tergolong beruntung (*advantage children*). Kondisi ini akan berdampak di kemudian hari setelah anak-anak miskin dengan pendidikan rendah ini memasuki dunia kerja. Mereka akan menduduki posisi yang juga rendah atau menjadi tenaga tidak terampil (*unskilled labour*), bahkan menjadi penganggur (*jobless*). Selanjutnya, bila mereka berkeluarga, pendidikan anak-anaknya juga akan relatif sama dengan taraf dan kualitas pendidikan yang dialami orangtuanya. Demikianlah siklus pendidikan seperti ini berlangsung dari generasi ke generasi dengan akibat pewarisan kemiskinan antar generasi. Dinamika kemiskinan yang pengaruhnya timbal-balik dengan pendidikan ini berlangsung juga di Indonesia.

Hal kedua, kemiskinan juga berakibat pada perumahan. Menurut Farley, dibandingkan dengan warga-negara Amerika Serikat umumnya, orang-orang miskin di perkotaan menempati rumah yang kurang layak huni dalam ukuran Amerika Serikat. Baik pada

musim panas maupun musim dingin, mereka tidak menggunakan pemanas ruangan (*heater*) dan penyejuk ruangan (*air-conditioner*) karena mereka tidak mampu membayar tagihan rekening listrik. Akibatnya, kondisi rumah yang tidak mendukung kesehatan fisik ini adalah rendahnya tingkat kesehatan orang-orang miskin. Masalah ini berkenaan dengan perumahan penduduk miskin adalah banyaknya penghuni dalam satu rumah (*overcrowded*) yang disebabkan oleh dua atau tiga keluarga tinggal dalam satu rumah, sehingga pembayaran sewa rumah bisa ditanggung bersama.

Di beberapa kota besar di Indonesia, kondisi perumahan orang-orang miskin seperti di Amerika pada waktu itu juga terjadi. Meskipun orang-orang miskin yang datang ke kota besar ini tidak tinggal dalam satu rumah, namun rumah petak yang mereka kontrak terletak di gang atau lorong sempit yang gelap dikelilingi oleh tembok-tembok pertokoan bertingkat, sehingga sebenarnya tergolong pemukiman sangat padat.

Ketiga, masalah lain yang berkenaan juga dengan perumahan adalah orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal (*homeless*). Orang miskin yang tidak memiliki rumah ini tinggal di taman kota, pinggir jalan, tenda atau tempat-tempat yang disediakan oleh lembaga sosial dan gereja. Penyebab gejala *homeless* ini adalah pengangguran, tidak memiliki keluarga yang bisa atau mau menampung dan merawat mereka, dan dikeluarkannya pasien penyakit jiwa dari rumah-sakit jiwa. Yang ironis, menurut Farley, beberapa pemerintah kota justru mengeluarkan aturan yang melarang orang tidur di taman kota dan tempat-tempat umum.

Di Indonesia kita dapati orang miskin atau gelandangan yang digusur oleh petugas

keamanan dan ketertiban—karena dianggap penghuni liar—tinggal di lahan pemerintah atau swasta, di kolong jalan layang, dan di bantaran kali.

Keempat, kemiskinan juga berakibat terhadap kriminalitas. Di satu pihak, penduduk miskin dapat menjadi korban kejahatan, seperti dirampok atau diperas, karena mereka tidak cukup memiliki akses terhadap perlindungan wilayah yang mereka huni. Dalam hubungan ini Farley mengemukakan statistik nasional kejahatan di Amerika saat itu yang menunjukkan bahwa korban kejahatan dua kali lebih banyak dialami oleh orang miskin daripada warga Amerika yang beruntung (*advantage people*). Di pihak lain, orang miskin juga dapat menjadi pelaku kejahatan yang secara umum disebabkan oleh terbatasnya pendapatan mereka. Berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang beruntung, kejahatan yang dilakukan oleh orang miskin ini lebih mudah terungkap dan tertangkap pelakunya. Hal ini disebabkan karena baik jenis, tindakan, maupun lokasi kejahatannya berlangsung di tempat-tempat umum (perampokan di toko, peredaran narkoba di jalan umum, dan pekerja seks yang menawarkan diri di jalan umum). Sedangkan pola kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang tergolong kerah-putih (*white collar crimes*) sangat berbeda dengan pola kejahatan yang dilakukan oleh orang miskin, sehingga secara relatif lebih sulit terungkap. Demikianlah, menurut Farley (1987); intinya adalah "*poverty breeds crime*". Di Indonesia perbedaan pola kejahatan antara mereka yang berkerah putih dan orang miskin juga diduga sama dengan pola kejahatan Amerika di atas. Proses peradilan tindak kejahatan seperti perampokan, penjambretan, dan pencurian

berlangsung lebih cepat (karena pembuktiannya mudah) dibandingkan dengan proses peradilan terhadap pelaku tindak kejahatan kerah-putih, seperti para koruptor.

Kelima, Farley juga mengemukakan akibat kemiskinan terhadap kondisi mental. Dengan merujuk pada beberapa hasil penelitian, terbukti bahwa orang-orang yang berpenghasilan rendah atau orang miskin merasa kurang bahagia (*less happiness*) dan bahkan mengalami gangguan mental yang serius, seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan kepribadian (Dohrenwend, 1971; Warheit, Holzer, & Schwab, 1973, dalam Farley, 1987). Penelitian lain juga menunjukkan rendahnya derajat kebahagiaan orang miskin di Amerika (Campbell, Converse, & Rogers, 1976, dalam Farley, 1987). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kemiskinan dengan gangguan mental.

Bagaimana hubungan antara kemiskinan dan kesehatan jiwa di Indonesia? Penulis tidak mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, beberapa kasus individual, seperti seorang siswa SMP yang bunuh-diri disebabkan oleh orangtuanya yang tidak mampu bayar SPP dan seorang ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri, kuli bangunan yang membunuh pembantu rumah-tangga, serta anggota Satpam yang membunuh penghuni rumah yang justru harus dijaganya, barangkali dapat dijadikan petunjuk mengenai adanya hubungan antara kemiskinan dengan stres yang dialami mereka sebagai akibat tekanan ekonomi atau menanggung beban hidup yang berat.

Cara Pandang Terhadap Kemiskinan

Uraian mengenai kemiskinan atau orang miskin terdahulu pada intinya menggambarkan sisi negatif orang miskin, seperti mempersempit

dan mencemari sungai, pedagang kaki lima yang membuat tidak nyaman pejalan kaki dan kemacetan lalu lintas, merusak fasilitas kota, penjangbretan, pengemis, dan lain-lain. Maka beralasan apabila masyarakat memandang orang miskin atau kemiskinan identik dengan kotor, kumuh, malas, sulit diatur, tidak disiplin, sumber penyakit, kekacauan, bahkan kejahatan. Dengan perkataan lain, kaum miskin dan papa ini adalah "sampah masyarakat", sehingga mereka tidak perlu dibantu peningkatan kesejahteraannya karena pada diri kaum miskin ini sudah terinternalisasikan (*internalized*) "budaya-kemiskinan" yang sulit atau bahkan tidak mungkin diubah (malas, suka jalan pintas, sulit diajak berubah, tidak menghargai waktu, boros, dan berorientasi ke masa kini).

Pandangan yang menyalahkan orang miskin (*blaming the poor*) seperti dikemukakan di atas ini diperkuat oleh pendapat seorang psikolog, Richard Herrnstein, yang menulis buku *The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life* (1994), yang intinya mengemukakan taraf inteligensi (IQ) orang miskin (Levin, Iknis, Carroll, & Bourne, 2000). Menurut Herrnstein, taraf inteligensi individu akan meningkat sejalan dengan meningkatnya taraf sosial-ekonomi individu yang bersangkutan. Itulah sebabnya, menurut Herrnstein yang kemudian didukung oleh seorang pengamat kebijakan publik bernama Charles Murray, mengapa berbagai posisi tinggi di dunia kerja diduduki oleh individu dengan kecerdasan tinggi. Maka menurut mereka berdua memang terdapat perbedaan taraf kecerdasan antara orang miskin dan orang kaya yang dasarnya bawaan atau genetik (Hernstein & Murray, 1994, dalam Levin et al., 2000).

Para pakar ilmuwan sosial banyak yang tidak menerima pendapat Herrnstein dan Murray

ini. Argumentasi bahwa ada hubungan yang kuat antara taraf inteligensi dan keberhasilan individu di bidang ekonomi dianggap lemah (Fraser, 1995; Fisher et al., 1996; Jacoby & Glaubermaan, 1995, dalam Farley, 1987). Bahkan oleh Michel & Nunley, buku *the Bell Curve* dianggap sebagai *fraud* atau penipuan (1997, dalam Levin et al., 2000). Hal ini karena buku tersebut merupakan upaya politik dari mereka (baca: orang kulit putih) yang menduduki jabatan tinggi untuk menghentikan atau mengakhiri *affirmative action* kaum miskin.

Dari uraian mengenai pandangan terhadap kemiskinan di atas dapat disimpulkan dua hal: (a) terdapat pandangan yang menekankan penyebab kemiskinan pada faktor individu (budaya-kemiskinan dan inteligensi), padahal individu tidak dapat dipisahkan baik dari struktur maupun kultur masyarakat, seperti kesempatan yang tidak sama antara orang miskin dan orang kaya dalam hal memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta (b) terdapat pandangan yang menekankan sisi negatif dalam memahami orang miskin (malas, suka jalan-pintas, bodoh, dan lain-lain). Padahal, menurut Herbert Gans (1972, dalam Levin et al., 2000), terdapat fungsi positif dari orang miskin atau kemiskinan, sebagai berikut: (a) orang miskin melakukan pekerjaan kotor (*dirty works*) dengan upah rendah, selain pekerjaan yang mengandung bahaya, tidak bermartabat, dan tidak diminati oleh kelompok masyarakat yang beruntung, misalnya, tukang sampah, tukang gali jalan, kuli bangunan tinggi, dan tukang sapu jalan, (b) orang miskin membeli atau menampung barang-barang bekas yang tidak digunakan oleh orang kaya (koran bekas, alat elektronik bekas, kipas angin, jam tangan, dan lain-lain/tukang loak), (c) orang

miskin dijadikan acuan oleh masyarakat untuk mengetahui posisi atau status sosial-ekonomi anggota masyarakat yang bersangkutan: sosial ekonomi tinggi, menengah, atau rendah, (d) orang miskin "menyediakan" pekerjaan bagi sejumlah posisi atau profesi yang ada; oleh karena ada orang miskin, maka "terciptalah" pekerjaan bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi pemerintah, psikolog, sosiolog, kriminolog, dan lain-lain.

Diajukannya pendapat bahwa kemiskinan bukan semata-mata disebabkan oleh faktor individu—melainkan juga terdapat kontribusi peran faktor struktur dan kultur masyarakat, serta adanya fungsi positif kaum miskin, dimaksudkan agar cara pandang terhadap kemiskinan menjadi utuh. Demikian pula, kemiskinan harus dipandang bukan semata-mata masalah ekonomi atau keterbatasan modal dan rendahnya keterampilan orang miskin, melainkan juga berkenaan dengan masalah mentalitas orang miskin. Dengan memandang kemiskinan sebagai gejala yang utuh dan komprehensif, maka diharapkan program pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran.

Pendekatan Psikologi Sosial

Sebelum mengemukakan pendekatan psikologi sosial dalam pengentasan kemiskinan, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian kemiskinan dan pengertian psikologi sosial.

Kebanyakan orang umumnya akan mengasosiasikan kemiskinan dengan keterbatasan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan dasar. Pengertian kemiskinan yang sifatnya pragmatis ini memang lazim digunakan. Oleh karenanya, konsekuensi selanjutnya adalah dibedakan antara orang miskin yang benar-benar tidak

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bisa bertahan hidup (kemiskinan absolut), dan orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena tuntutan standar hidup (yang tinggi) dari masyarakat yang bersangkutan (kemiskinan relatif). Sebagai contoh, orang miskin yang tinggal di Jakarta tergolong kemiskinan relatif karena meskipun penghasilan orang miskin di Jakarta tergolong "lumayan", namun mereka sangat sulit bertahan hidup di Jakarta karena tuntutan biaya hidupnya yang tinggi. Seandainya ada orang miskin di Jakarta yang penghasilannya "pas-pasan", sehingga tidak mungkin bertahan hidup di Jakarta, maka mereka tergolong pada kemiskinan absolut.

Barangkali, bila dibandingkan antara penduduk miskin perkotaan dengan penduduk miskin pedesaan, umumnya penduduk miskin perkotaan tergolong kemiskinan relatif karena, meskipun di satu pihak biaya hidup yang tinggi, di perkotaan relatif tersedia lapangan kerja di sektor informal (tukang parkir, pedagang asongan, pedagang kaki-lima, dan buruh bangunan). Sedangkan kemiskinan di pedesaan tergolong kemiskinan absolut karena, meskipun biaya hidup di pedesaan relatif rendah, namun tidak tersedia lapangan kerja sebagai sumber penghasilan. Meskipun kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan relatif, namun dalam pembahasan pengentasan kemiskinan selanjutnya tidak secara spesifik dilakukan pemisahan atas dasar kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

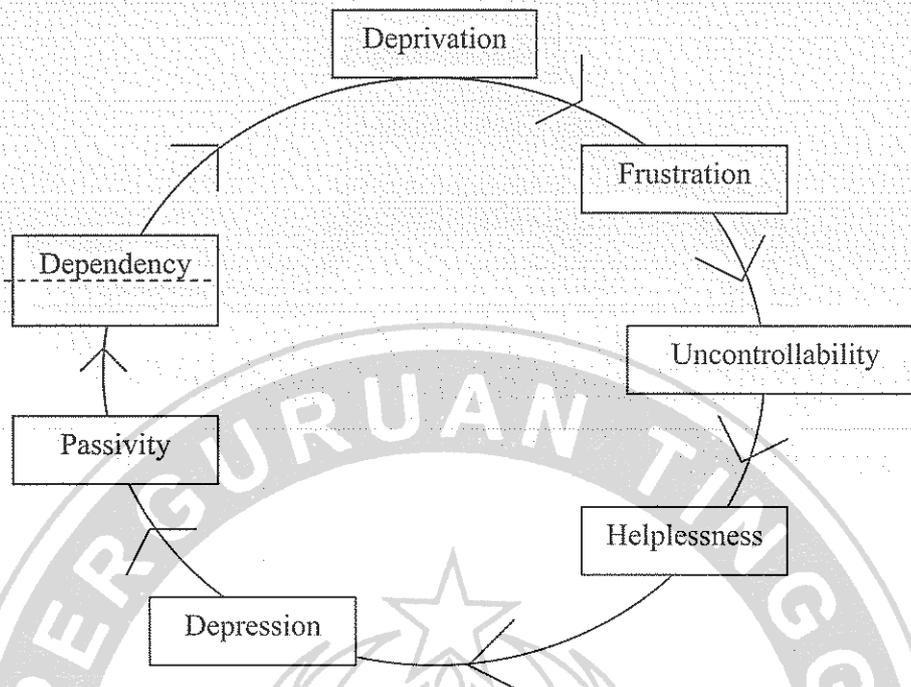
Selanjutnya, berikut ini dikemukakan mengenai pendekatan psikologi sosial, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Sebelum mengemukakan pendekatan psikologi sosial, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian

psikologi sosial secara singkat.

Manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain atau masyarakat. Kemampuan berbicara dan berbahasa serta sopan-santun, misalnya, diperoleh dalam keluarga. Demikian pula perilaku lainnya, apakah seseorang akan menjadi individu yang tumbuh dan berkembang ke arah yang baik atau sebaliknya, ditentukan atau "dibentuk" oleh lingkungan sosialnya. Tentu saja manusia bukanlah makhluk pasif atau semata-mata dikendalikan oleh dorongan instingtif dan mengikuti kehendak lingkungan, melainkan manusia bisa secara aktif merancang, bahkan merubah dunianya.

Atas dasar ini ruang lingkup psikologi sosial meliputi interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, intra-kelompok, dan antar-kelompok. Dalam psikologi sosial, individu diletakkan dalam konteks sosial. Atau, tingkahlaku individu bukan semata-mata ditentukan oleh individu, melainkan merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Secara rinci psikologi sosial dirumuskan sebagai "*the scientific field that seeks to understand the nature and causes of individual behavior and thought in social situations*" (Baron, Branscombe, & Byrne, 2008: 6). Yang perlu digaribawahi dari definisi di atas adalah upaya memahami tingkah laku dan pikiran individu dalam situasi sosial. Artinya, individu akan berperilaku berbeda pada saat di ruang kuliah, di jalanan umum, di lingkungan keluarga, dan di suatu resepsi pernikahan.

Dihubungkan dengan upaya pengentasan kemiskinan, pendekatan psikologi sosial diartikan sebagai bukan hanya melakukan intervensi atau perubahan *mind-set* individu orang miskin, melainkan melakukan juga



Gambar 1. Lingkaran kemiskinan

intervensi lingkungan yang meliputi faktor kultural dan struktural (Levin et al., 2000). Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan psikologi sosial meliputi tiga tingkatan: individual, kultural, dan struktural.

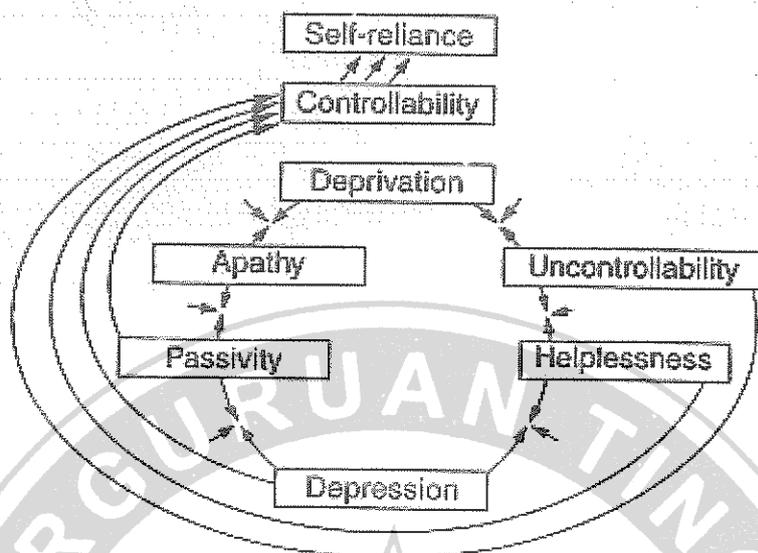
Intervensi individual

Untuk melakukan intervensi tingkat individual dari orang miskin terlebih dahulu perlu dipahami psikologi orang miskin (*psychology of the poor*). Sebagai acuan untuk memahami psikologi orang miskin digunakan gagasan lingkaran kemiskinan (*poverty cycle*) dari Seligman (1975, dalam Ortigas, 2000) (lihat Gambar 1).

Dilihat dari perspektif psikologi, orang miskin adalah orang yang mengalami kondisi deprivasi (*deprivation*). Artinya, akses orang miskin terhadap berbagai fasilitas layanan

umum (kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, lembaga keuangan, dan lain-lain) sangat terbatas, bahkan tertutup. Orang miskin juga tidak bisa mengendalikan nasibnya atau hari depannya (*uncontrollability*) karena, selain merupakan kelompok minoritas, juga posisi tawarnya (*bargaining power*) lemah. Sebagai contoh, petani di pedesaan tidak bisa menentukan harga beras sesuai dengan kemauannya, sedangkan penjual pupuk atau sepeda motor dapat mendikte harga komoditi mereka kepada petani sesuai dengan yang mereka kehendaki.

Akibat dari kondisi orang miskin yang tidak bisa menguasai atau mengendalikan kondisi lingkungannya (tidak memiliki posisi tawar yang kuat, peraturan yang merugikan orang miskin, dan harga kebutuhan pokok yang tidak terjangkau), orang miskin menjadi tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan merasa tidak berdaya (*helpless*). Selanjutnya, kondisi ini



Gambar 2. Titik-titik intervensi dalam lingkaran kemiskinan

diikuti oleh sikap mereka yang pasif (*passivity*), tidak acuh atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya (*apathy*), dan akhirnya orang miskin akan tetap berada dalam kondisi deprivasi.

Atas dasar pemahaman mengenai lingkaran kemiskinan di atas, tentulah terdapat hal-hal yang harus dilakukan untuk merubah *mind-set* orang miskin. Menurut Ortigas (2000), pada prinsipnya, lingkaran kemiskinan ini harus dihentikan atau tidak boleh terus berputar, yakni dengan cara memutus lingkaran sedini mungkin sebelum terjadi perpindahan ke kondisi lebih lanjut. Pemutusan lingkaran kemiskinan ini dimaksudkan agar orang miskin tidak terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan untuk itu mereka diyakinkan mempunyai kemampuan atau keterampilan tertentu (*self-efficacy*) yang selanjutnya akan tumbuh harga-dirinya (*self-esteem*). Dengan dimilikinya keyakinan mampu melakukan sesuatu dan harga diri, diharapkan orang miskin akan menjadi tahan banting dan dapat bangkit kembali (*self-*

reliance) tatkala orang miskin menghadapi situasi yang sulit dan berat (lihat Gambar 2).

Intervensi Kultural

Di samping melakukan intervensi pada tingkat individual, dalam pendekatan psikologi sosial, perlu juga ada upaya intervensi kultural. Hal ini karena pada orang atau kelompok yang telah lama berada dalam kemiskinan atau mengalami deprivasi akan terbentuk budaya-kemiskinan yang sering diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya kemiskinan digambarkan sebagai tidak adanya perencanaan hidup dan tidak dapat menunda kesenangan, sehingga mereka tidak memiliki tabungan atau membuat anak mereka yang sekolah tidak bisa menyelesaikan sekolahnya (*drop-out*). Maka wajar apabila mereka miskin, karena mereka sendiri lah yang menciptakan kemiskinan untuk dirinya sendiri. Dengan perkataan lain, orang miskin sendiri lah yang telah menggali lubang kubur kemiskinan untuk diri mereka sendiri.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana merubah kultur kemiskinan. Mengingat pemilik kultur kemiskinan adalah kaum miskin dengan status sosial-ekonomi rendah, maka kultur mereka harus diubah dengan kultur kelompok sosial-ekonomi menengah yang lebih bermartabat, agar mereka keluar dari kultur kemiskinan. Dalam hubungan ini, program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tidak dapat dijadikan program jangka panjang karena justru akan berakibat memantapkan kultur kemiskinan. Program BLT hendaknya dipandang sebagai “obat sakit kepala” yang hanya sesaat menghilangkan sindrom sakit (Muluk, 2009). Sebaliknya, upaya menumbuhkan *self-efficacy*, *self reliance*, dan kemandirian melalui program *empowerment*, harus dijadikan prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Intervensi Struktural

Intervensi struktural perlu dilakukan dengan asumsi bahwa kemiskinan bukan disebabkan oleh karakteristik orang miskin sebagaimana dikemukakan terdahulu (malas, suka jalan pintas, gaya hidup boros, dan lain-lain), melainkan disebabkan oleh struktur masyarakat yang menghasilkan kondisi bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpuruk. Yang paling terpuruk oleh kenaikan harga BBM adalah kelompok lapisan ekonomi rendah, sementara para pemilik pompa bensin dan kelompok lapisan atas tertentu mengeruk keuntungan atau setidaknya tidak merasakan dampaknya.

Dilihat dari segi sejarah, akar kemiskinan menurut Karl Marx, disebabkan oleh penguasaan alat produksi oleh pemilik modal atau kapitalis. Para kapitalis ini memaksimalkan

keuntungannya dengan mengeksploitasi buruh. Akibatnya, menurut Karl Marx, para kapitalis secara ekonomis surplus besar, namun di lain pihak jurang ketidakadilan (*inequality*) semakin lebar.

Yang penting adalah mencari intervensi struktural yang dapat dilakukan. Bila kita cermati kondisi Indonesia, maka secara struktural ekonomi Indonesia memang makin berorientasi kapitalistik. Hal ini terlihat dari berdirinya berbagai *super-market* yang mematikan pasar tradisional, perumahan dan apartemen mewah, serta sarana hiburan dengan harga tiket yang sulit dijangkau, dan lain-lain. Meskipun pemerintah telah membangun apartemen bersubsidi, namun biayanya tetap tidak terjangkau oleh kelompok sosial-ekonomi menengah. Dengan demikian, intervensi pengentasan kemiskinan harus secara struktural (baca: *political will*), yakni dengan memprioritaskan dibukanya akses orang miskin terhadap pendidikan, kesehatan, listrik, perumahan, air bersih, dan program *welfare* lainnya. Contoh intervensi struktural yang patut dibanggakan karena tidak menimbulkan konflik antara Pemda Solo dan para PKL adalah upaya walikota Solo dalam merelokasi PKL ke pasar yang dibangun oleh Pemda Solo.

Kesimpulan dan Saran

Masalah kemiskinan merupakan masalah besar bagi Indonesia yang jumlah penduduk miskinnya mencapai lebih kurang 35 juta atau kira-kira 15% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Melihat hasil pengentasan kemiskinan selama ini yang tidak bermakna, timbul pertanyaan: Dapatkah Indonesia mengurangi angka kemiskinan dalam kurun waktu enam tahun ke depan sesuai dengan sasaran MDGs?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidaklah mudah. Namun bagaimanapun, perlu ada langkah awal yang nyata yang tidak berpretensi menyelesaikannya secara tuntas dan segera, melainkan berprinsip “*piece-meal problem solving*” (Somantri, 2007).

Tulisan ini mengajak para pemangku kepentingan untuk memandang kemiskinan sebagai fenomena yang utuh yang memerlukan pendekatan pada tingkat individual, kultural, dan struktural. Pendekatan psikologi sosial dalam hal ini dapat melakukan intervensi baik individu, kultur, maupun struktur yang menjadi penyebab kemiskinan.

Bibliografi

Baron, R. A., Branscombe, N. R., & Byrne, D. (2008). *Social psychology*. Boston: Pearson Education Inc.

Brodjonegoro, B. P. S. (2007). *Pencapaian MDGs dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia*. Depok: Panitia Lokakarya Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.

Farley, J.E. (1987). *American social problems: An institutional analysis*. New Jersey: Prentice Hall.

Kemiskinan bertambah. (2009, 13 Februari). *Kompas*, 1 & 15.

Kusumaatmadja, S. (Ed.). (2007). *Politik dan kemiskinan*. Depok: Koekoesan.

Levin, J., Iknis, K. M., Carroll, W. F., & Bourne, R. (2000). *Social problems. Causes, consequences, interventions*. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.

Muluk, H. (2009). *Mosaik psikologi politik Indonesia*. Depok: Insos Books

Ortigas, C. D. (2000). *Poverty revisited. A social psychological approach to community empowerment*. Manila: Ateneo

de Manila University Press.

Somantri, G. R. (2007). *Beyond “delusion of grandeur”: Menuju Indonesia baru “bebas” kemiskinan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Sosiologi Perkotaan. Depok: Lembaga Penerbitan FE UI.

Understanding poverty. (2009). Ditemukembali pada 6 April 2009, dari <http://go.worldbank.org/RQBDCTUXW0>